### BAB III

# KESAMAAN BAGIAN WARIS DALAM PUTUSAN PA No: 3052/PDT.G.2010/PA.KAB.MLG

## A. Keberadaan Pengadilan Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang. Pengadilan Agama Kabipaten Malang memrupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di Indonesia. 1

Wilayah Hukum (Kompetensi Relatif) Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu (asalnya Kota Admnistratif Batu yang sejak tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur menjadi kota Batu da Walikotanya telah dilantik pada tanggal 22 Oktober 2001) yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kecamatan meliputi 389 desa/kelurahan, khusus wilyah Pemerintah Kota Batu terdiri dari 3 (tiga) kecamatan meliputi 23 desa/kelurahan.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), 6.

Adapun kompetensi absolut pengadilan Agama kabipaten Malang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah kedalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

### 1. Perkawinan

Bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah: izin poligami, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, pembatalan perkawinan, kelalaian atas kewajiban suami/istri,cerai talak,cerai gugat,harta bersama, penguasaan anak, nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu, hak-hak mantan istri atau kewajiban suami,pengesahan anak, pencabutan kekuasaan orang tua, perwalian, pencabutan kekuasaan wali, penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan, ganti rugi terhadap wali, asal-usul anak, penolakan kawin campuran, isbāt nikah, dispensasi kawin,wali 'adāl.

#### 2. Kewarisan

Kewenangan dalam hal kewarisan adalah: Penentuan ahli waris, Penentuan mengenai harta peninggalan, Penentuan bagian masing-masing ahli waris, Melaksanakan pembagian harta waris tersebut.<sup>2</sup>

#### 3. Wasiat

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- 4. Hibah
- 5. Wakaf
- 6. Shadaqoh. dan
- 7. Ekonomi syari'ah.<sup>3</sup>

# B. Deskripsi Kasus dalam putusan No. 3052/pdt.g.2010/pa.kab.mlg tentang Kesamaan Bagian Waris di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Masalah pembagian harta waris yang akan diteliti kali ini adalah tentang pembagian harta waris secara rata dalam putusan PA Kabupaten Malang Nomor: 3052/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai institusi yang berwenang mengadili perkara tersebut telah menunjuk majelis hakim untuk menyelesaikan perkara yang diajukan oleh penggugat secara adil dan bijak sesuai dengan prosedur dan hukum materinya.<sup>4</sup>

Kasus yang akan diteliti kali ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 juli 2010 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor: 3052/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg.

Gugatan berawal dari penggugat yang merasa hak warisnya tidak didapatkan sebagaimana mestinya dan harta waris belum dibagi, namun para

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Putusan PA Kabupaten Malang Nomor: 3052/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg Pengadilan Agama Kabupaten Malang

tergugat sudah menguasai harta peninggalan pewaris.Penggugat menggugat 10 saudaranya yakni 5 saudara laki-laki dan 5 saudara perempuan yang sudah menguasai harta waris tersebut. Penggugat meminta Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memanggil para pihak yang terlibat, memeriksa, mengadili dan kemudian menjatuhkan putusan sesuai gugatan penggugat.<sup>5</sup>

Dalam kasus pembagian harta waris tersebut pihak yang menggugat adalah: Zaenal Arifin sebagai penggugat dan menguasakan kepada kuasa hukumnya yaitu Supriono, SH, M.Hum dan Edi Hartanto, SH. dan pihak-pihak sebagai tergugat adalah Hj. Siti Qomariah sebagai tergugat I, HJ. Siti Asiyah sebagai tergugat II, Mariah Ulfa sebagai tergugat III, Muchammad Ghufron sebagai tergugat IV, Ghofar Ismail sebagai tergugat V, Ana Chorida sebagai tergugat VI, Miftahul Huda sebagai tergugat VII, Umul Khoir sebagai tergugat VIII Achmad Muchlison sebagai tergugat IX, Chanif Muhtadi sebagai tergugat X.6

Dasar dari gugatan ini adalah perasaan ketidak puasan penggugat atas penguasaan sebagian harta waris oleh beberapa ahli waris, menurut penggugat para ahli waris lain telah memiliki harta warisan secara tidak sah karena pembagian harta warisan sesuai dengan hukum waris Islam tidak pernah dilakukan setelah si pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, penggugat

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Putusan Pengadilan Agama Kabupate Malang Nomor: 3052/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg. hal. 1.

memohon pengadilan untuk menetapkan para ahli waris yang telah mengusai harta waris yang dinilai secara tidak sah selama ini diputuskan melakukan kejahatan, dan harta waris dibagi sebagaimana pembagian dalam hukum Islam, yakni perbandingan laki-laki mendapat dua kali bagian ahli waris perempuan.<sup>7</sup>

Pengajuan gugatan tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa almarhum orang tua penggugat amaupun tergugat bernama H. Muchsin Ali (bapak) wafat pada tanggal 10 april 2006 dan ibu bernama Hj. Siti Muayanah wafat pada tanggal 11 juli 2002 dan meninggalkan ahli waris (anak) yaitu penggugat (anak ke-3 dan anak laki-laki pertama) serta para tergugat (anak pertama sampai anak ke sepuluh).
- 2. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas almarhum juga meninggalkan utang dan meninggalkan harta warisan berupa:
  - a. Sebidang tanah dengan sertipikat hak milk nomor 154, gambar situasi nomor 1789,tanggal 26 juli 1983, dengan luas 8150 M2 atas nama Moch. Muksin Rekso Utomo, terletak di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji kabupaten Malang, belum dibgi waris dan saat ini masih dikuasai oleh tergugat VII (Miftahul Huda, S.Ag)
  - b. Sebidang tanah sluas 9360 M2, engan sertipikat hak milik No.155, gambar situasi Nomor 2657, tanggal 19 nopember 1983 atas nama Moch. Muksin

<sup>7</sup> Ibid.

- Rekso Utomo, terletak di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji kabupaten Malang.
- c. Tanah sawah terletak di desa Kendalpayak (belakang SD Kendalpayak) Blok 26, SPT.13, seluas 4000 M2, Dengan sertipikat hak milik nomor. 2657 tahun 1983, atas nama Moch. Muksin Rekso Utomo, saat ini msih dikuasai oleh tergugat VII (Miftahul Huda, S.Ag).
- d. Bangunan rumah yang berdiri diatas tanah seluas + 514 M2, SPPT Pajak No.3507.198012.034-0101.0 tertulis atas nama Hj.Muayannah terletak di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji kabupaten Malang.
- e. Sebuah rumah yang berdiri diatas tanah seluas 248 M2 Dengan sertipikat diatas namakan Hj.Siti Qomariah (tergugat I) terletak di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji kabupaten Malang.
- f. Bangunan pondok pesantren, persil Nomor 137 sertipikat hak milik diatas namakan Hj. Siti Qomariah (tergugat I) seluas 901 M2 terletak di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji kabupaten Malang.
- g. Sebidang tanah berdiri bangunan rumah seluas 400 M2, dengan sertipikat diatas namakan Siti Asiyah (tergugat II), di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji kabupaten Malang.
- h. Sebidang tanah seluas 500 M2, dan telah dibangunkan rumah oleh penggugat (Drs. Zaenal Arifin) dan ditempati, terletak di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji kabupaten Malang.

- Bangunan pabrik karton berdiri diatas tanah seluas + 1000 M2atas nama
   H.M.Muksin lebih kurang 500 M2 saat ini dikuasaiterggat IV
   (Muchammad Ghufron) terletak di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji
   kabupaten Malang. Dan separohnya seluas 500 M2 dikuasai oleh tergugat
   V (Ghofar Ismail, SH).
- j. Bangunan rumah dan tanah seluas 300 M2, dengan sertipikat hak milik diatas nama Zaenal Arifin (penggugat), terletak di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji kabupaten Malang, saat ini dikuasai oleh tergugat VI (Ana Chorida).
- k. Sebidang tanah berdiri bangunan rumah seluas + 1100 m2 terletak di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji kabupaten Malang, saat ini dikuasai oleh tergugat VII (Miftahul Huda, S.Ag)
- Bangunan rumah diatas tanah seluas 270 M2, terletak di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji kabupaten Malang, yang saat ini dikuasai oleh tergugat tergugat VIII (Dra.Umul Choir)
- m. Bangunan rumah berlantai dua yang membangun adalah H.Rosidi yaitu suami tergugat II (Dra.Hj.Siti Asiyah) berdiri diatas tanah seluas 250 M2, terletak di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji kabupaten Malang. Yang saat ini dikuasai tergugat X (Chanif Muhtadi).
- n. Bangunan rumah induk berlantai dua berdiri diatas tanah seluas 237 M2, terletak di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji kabupaten Malang, yang

- saat ini yang saat ini dikuasai oleh tergugat tergugat X (Ir. Achmad Muhlison).
- o. Bahwa disamping tanah sawah, bangunan rumah dan tanah-tanah sebagaimana tersebut diatas, almarhum juga meninggalkan peralatan pabrik karton yang berda di dalam pabrik tersebut sebagaimana disebut dalam poin 9, terdiri dari:
  - 1) Mesin pembuatan karton berjumlah 1 unit.
  - 2) Beberapa mesin potong.
  - 3) Beberapa unit generator sebagai pembangkit tenaga mesin dan perlengkapan pabrk lainnya, yang kesemuanya peraltan tersebut bila dinilai dengan bnilai uang tidak kurang dari Rp. 800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupih) dan saat ini telah dialihkan kepada pihak lain tanpa seizin ahli waris lainnya.
- p. Bahwa disamping meninggalkan harta warisan sebagaimana tersebut diatas, ternyata almarhum orang tua penggugat dan para tergugat masih juga meninggalkan hutang pada H.Rosidi suami tergugat II Atas pembiayaan pembangunan rumah yang saat ini ditempati oleh tergugat X (Chanif Muhtadi), 1 unit mobil Pick Up dan 1 unit sepeda motor suzuki yang tentunya itupun harus diselesaikan.
- q. Bahwa sebagaimana ketentuan hukum waris yang berlaku, terbukanya harta warisan itu terhitung sejak meninggalnya sipewaris, demikian pula

dalam perkara ini sejak meninggalnya almarhum, orang tua penggugat dan para terguga (selaku anak-anak yatim) harta warisan tersebut belum pernah di bagiwaris sebagaimana mestinya sedang penguasaan atas objek warisan sebagaimana diatas bukan karna warisan namun kehendak sendiri dari masing-masinng pihak tanpa mengindahkan syariat agama ataupun ketentuan hukum yag berlaku, dengan demikian sikap dan tindakan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum dan dholim.

r. Bahwa belakangan diketahui ternyata harta warisn yang belum pernah dibagi waris tersebut yang dikuasi oleh tergugat VII (Miftahul Huda, S.Ag) sebagaimnana terurai dalam poin 2, bila 2 bidang tanah tersebut bila ditanami adi setiap tahun bisa panen 3 kali dengan rincian setiap kali panen dapat menghasilkan uang Rp.30.000.000.0, (tiga puluh juta rupiah). Kali 6 tahu: 360.000.000.00, (tiga ratus enam puluh juta rupiah) seama ini hasilnya sudah dinikmati sendiri secara dholim tanpa persetujuan ahli waris lainny terutama pada penggugat, tanpa seizin ahli waris lainnya sebagaian sawah telah dialihkan kepada pihak lain dengan cara disewakan, jelas hal ini adalah perbuatan melawan hukumyang mengarah pada perbuatan kriminal dan sangat merugikan pewaris lainnya. Padahal jelas dalam Al-Qur'an surat al-nisa ayat 10 allah SWT berfirman "sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara

- dholim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk kedalam api neraka yang menyala-nyala".
- s. Bahwa dalam permasaahan ini penggugat selaku anak laki-laki pertama selalu berupaya dan mengingatkan kepada para tergugat agar secepatnya masalah ini diselesaikan secara baik da proporsional, baik secara langsung maupun melaluiaparatur desa, namun sayangnya usaha tersebut hanyalah sia-sia belaka dan semuanya bersikap egois dengan mengabaikan perintah-perintah Allah swt, maka sangat terpaksa sekali penggugat selesaikan lewat jalan jalur hukum yang ada sebagaimana saat ini.
- tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semua perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yyang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja maka mereka memperoleh separuh harta", semoga allah memberikan memberikan hidayah kepada para tergugat untuk sadar dan tawakal terhadap hukum-hukum Allah dan percaya pada hari lahir.
- u. Bahwa mengingat semua harta warisan tersebut baik harta tidak bergerak berupa rumah, tanah dan tanah sawah serta hasil-hasilnya tersebut maupun hutang almarhum belumlah dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan masih dalam penguasaan para tergugat, maka untuk menjaga

- jangan sampai objek warisan tersebut dipindah tangankan kepada pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian, penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan meletakan sita jaminan.
- v. Dan mengingat perkara ini adalah perkara harta warisan yang belum dibagi waris namun dengan melawan hukum telah dikuasai oleh para tergugat, maka agar konsisten melaksanakan keputusan maka adalah wajar bila penggugat menuntut uang paksa sebesar Rp. 200.000.,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya bila para tergugat lalai menjalankan isi putusan terhitung sejak keputusan ini dibacakan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang sampai dengan keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- w. Bahwa oleh karena gugatan ini telah dilengkapi dengan bukti-bukti yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 180 HIR dan pasal 191 RBG, maka penggugat mohon penetapan bahwa keputusan ini dapat dijalankan dulu walaupun para tergugat mengupayakan hukum berupa perlawanan, banding,kasai maupun upaya hukum lainnya.

Setelah Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa para tergugat dan tergugat dan para saksi, ahirnya hakim mendapatkan atau menemukan fakta berdasarkan keterangan dari penggugat, para tergugat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

Almarhum H.Muksin Ali dan almarhumah Hj,Siti Muayanah merea pernah menkah dan mempunyai 11 orang anak yaitu:

- 1. Hj. Siti Qomariah sebagai tergugat I,
- 2. HJ. Siti Asiyah sebagai tergugat II,
- 3. Zainal Arifin (penggugat),
- 4. Mariah Ulfa sebagai tergugat III,
- 5. Muchammad Ghufron sebagai tergugat IV,
- 6. Ghofar Ismail sebagai tergugat V,
- 7. Ana Chorida sebagai tergugat VI,
- 8. Miftahul Huda sebagai tergugat VII,
- 9. Umul Khoir sebagai tergugat VIII,
- 10. Achmad Muchlison sebagai tergugat IX,
- 11. Chanif Muhtadi sebagai tergugat X.8

Almarhum H.Muksin Ali selain mennggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan yang disebut Obyek sengketa yaitu :

 Berupa sebidang tanah dengan luas 9360 M2 dengan sertipikat hak milik (SHM) nomor 154, gambar situasi nomor 1789 tanggal 26 juli 1983, atas nama muhammad muksin rekso utomo terletak di desa Kendalpayak kecamatan Pakisaji, kabupaten Malang.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ibid.

- Sebidang tanah seluas 8150 M2 dengan sertipikat hak milik nomor 155, gambar sitasi nomor 2657, tanggal 19 nopember 1983 atas nama muhammad muksin rekso utomo, terletak di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji kabupaten Malang
- Tanah sawah yang terletak di desa Kendalpayak (belakang SD Kendalpayak)
   blok 26. SPT.13, seluas 4000 M², denngan sertipkat hak milik Nomor 2657t
   tahun 1983, atas nama Moch. Muksin rekso utomo.
- 4. Bangunan rumah yang berdiri diatas tanah seluas +514 M2, SSPT Pajak No.3507.198012.034-0101.0 tertulis atas nama Hj. Muayanah terletak di dusun cerme desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji,kabupaten Malang, ternyata berupa musholla.
- 5. Bangunan rumah yang berdiri diatas tanah seluas 248 M² dengan sertifikat diatas namakan HJ. Siti Qomariah (tergugat I) terletak di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji, kabupaten Malang, ternyata berupa musholla pondok pesantren belum sertifikat tetapi berupa akta pembagian hak bersama.
- Bangunan pondok pesantren, persil Nomor 137 sertipikat hak milik diatas namakan Hj. Siti Qomariah (tergugat I) seluas 901 M2, terletak didesa Kendalpayak,kecamatan Pakisaji, kabupaten Malang.
- 7. Sebidang tanah berdiri bangunan rumah seluas 400 M², dengan sertifikat diatas namakan Siti Asiyah (tergugat II), terletak di desa Kendalpayak,

- kecamatan Pakisaji, kabupaten Malang, ternyata onyek ini telah dijual oleh Hj. Siti Asiyah(tergugat II) kepada H. Masula.
- Sebidang tanah seluas 500 M², dan telah dibangun rumah oleh penggugat
   (Drs. Zainal Arifin) dan ditempati oleh penggugat, terletak di desa
   Kendalpayak, kecamatan Pakisaji, kabupaten Malang.
- 9. Bangunan pabrik Karton berdiri diatas tanah seluas + 1000 M² atas nama H.Muksin, lebih dari 500 M² Saat ini dikuasai oleh tergugat IV (Muchammad ghufron) terletak di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji, kabupaten Malang. Dan separuhnya 500 M² saat ini dikuasai tergugat V (Ghofar Ismail, SH).
- 10. Bangunan rumah dan tanah seluas 300 M², ternyata luasnya 196 M² dengan sertifikat hak milik atas nama Zainal Arifin (penggugat), terletak di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji, kabupaten Malang. Tanah ini asalnya milik penggugat kemudian dihibahkan kepada tergugat VI (Ana Chorida)
- Sebidang tanah seluas + 1100 M² berdiri bangunan rumah terletak di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji, kabupaten Malang. Saat ini dikuasai oleh tergugat VII ( Miftakhul Huda Sag,).
- 12. Bangunan rumah diatas tanah seluas 270 M², ternyata hanya seluas 162 M² terletak di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji,kabupaten Malang saat ini dikuasai tegugat VIII (Hj. Ummul Choir).

- 13. Bangunan rumah induk berlantai dua berdiri di atas tanah seluas 237 M<sup>2</sup>, terletak di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji, kabupaten Malang yang saat in dikuasai oleh tergugat IX (Ir. Achmad Muchlison), ternyata luasnya 438 M<sup>2</sup> dan dilantai dua terdapat satu kamar yang masuk ke lantai dua melalui musholla.
- 14. Bangunan rumah berlantai dua yang membangun adalah H. Rosidi yaitu suami tergugat II (Dra.Hj.Siti Asiyah) berdiri daitas tanah seluas 250 M², terletak di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji, kabupaten Malang, yang saat ini dikuasai oleh tergugat X (Chanif Muhtadi), ternyata luasnya 96 M².
- 15. Peralatan pabrik karton yang berada dalam pabrik tersebut, antara lain:
  - a. Mesin pembuat karton berjumlah 2 unit dalam kondisi rusak dan sudah 3 tahun idak beroprasi.
  - b. Satu unit mesin potong.
  - Sedangkan generator sebagai pembangkit tenaga mesin bendanya tidak ada.
- 16. Berupa satu unit mobil pick up Chevrolet dan satu unit sepeda motor suzuki
  GP sudah dijual oleh pewaris sewaktu masih hidup.<sup>9</sup>

Berdasarkan keterangan penggugat serta pengakuan para tergugat, maka dengan mendarsarkan pertimbangan pada pasal 1866 dan pasal 1932 KUHPerdata serta pasal 164 dan pasal 174 HIR, yang diberlakukan dalam

<sup>9</sup> Ibid.

pemeriksaan perkara ini berdasarkan pasal 54 undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perunahannya undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang pengadilan agama, maka telah terbukti bahwa dulu pernah hidup seorang laki-laki bernama H.Muchsin ali yang menikah dengan seorang perempuan bernama Hj.Muayanah.<sup>10</sup>

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang yang menjadi ahli waris karena faktor hubungan perkawinan, pertalian darah, memerdekakan hamba dan karena hubungan sesama islam. Menimbang, bahwa kuasa hukum penggugat terhadap telah keberatan terhadap saksi kedua para tergugat dengan alasan karena saksi kedua tersebut sebagai perangkat desa, tidak membawa surat tugas, menimbang, bahwa keberatan kuasa hukum penggugat terhadap surat tugas saksi kedua tidak beralasan hukum karena suat tugas tersebut merupakan syarat administratif, bukan merupakan syarat sahnya syaksi sebagaimana ditentukan oleh KUHPerdata, oleh kaea itu majelis berpendapat alasan kedua hukum penggugat harus dikesampingkan.

Menibang bahwa berdasarkan bukti (p.9 dan t.2) ditambah dengan keterangan saksi, telah terbukti bahwa dari perkawinan H. Muchsin Ali dengan seorang perempua bernama Hj. Siti Muayanah telah dikaruniai 11 orang anak yaitu: Hj. Siti Qomariah sebagai tergugat I, HJ. Siti Asiyah sebagai tergugat II, zainal arifin (penggugat), Mariah Ulfa sebagai tergugat III, Muchammad

<sup>10</sup> Thid.

Ghufron sebagai tergugat IV, Ghofar Ismail sebagai tergugat V, Ana Chorida sebagai tergugat VI, Miftahul Huda sebagai tergugat VII, Umul Khoir sebagai tergugat VIII Achmad Muchlison sebagai tergugat IX, Chanif Muhtadi sebagai tergugat X.<sup>11</sup>

Menimbang, bahwa disamping alm H. Muchsin Ali dan Hj.Muayanah mempunyai anak telah terbukti bahwa Hj. Muayanah meninggal dunia pada tanggal 15 juli 2002 sedangkan H. Muchsin Ali telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2006.

Menimbang, oleh karena H. Muchsin Ali dan Hj. Muayanah telah terbukti meninggal dunia, dan majelis hakim tidak menemukan ahli waris lain selain anak-anak kandung yang mempunyai pertalian darah dengan H. Muchsin Ali dan Hj. Muayanah tersebut, sehingga yang masuk ahli waris dari H. Muchsin Ali dan Hj. Muayanah adalah sebagai berikut:

- 1. Hj. Siti Qomariah sebagai tergugat I,
- 2. HJ. Siti Asiyah sebagai tergugat II,
- 3. Zainal Arifin (penggugat),
- 4. Mariah Ulfa sebagai tergugat III.
- 5. Muchammad Ghufron sebagai tergugat IV,
- 6. Ghofar Ismail sebagai tergugat V,
- 7. Ana Chorida sebagai tergugat VI,

<sup>11</sup> Ibid.

- 8. Miftahul Huda sebagai tergugat VII,
- 9. Umul Khoir sebagai tergugat VIII.
- 10. Achmad Muchlison sebagai tergugat IX,
- 11. Chanif Muhtadi sebagai tergugat X.12

Atas gugatan dan jawaban dari para pihak majelis hakim memutuskan beberapa hal atas perkara ini, diantaranya adalah mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan, dan beberapa gugatan lain dikesampingkan. Yang menjadi poin penting dalam penelitian ini adalah putusan majelis hakim untuk mengesampingkan permohonan penggugat untuk membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan dua berbanding satu, disini majelis hakim mempertimbangkan bahwa karena bagian para ahli waris porsinya sudah disepakati bersama untuk dibagi sama rata baik ahli waris laki-laki maupun perempuan, maka pembagian warisan dimana laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan mendapat satu bagian dapat dikesampingkan.

Majelis hakim mendasarkan putusan ini pada sabda baginda Rasulullah SAW:

artinya: "samakanlah diantara anak-anakmu dalam pemberian (hibah), seandainya aku boleh melebihkan diantara anak laki-laki dan perempuan, tentu aku akan melebihkan anak perempuan" (HR. Thabrani).

<sup>12</sup> Ibid.

Selain hadis tersebut majelis hakim juga berdasar pada Pasal 183 KHI sehingga majelis hakim menjadi yakin dalam memberikan putusan dikesampingkannya permohonan pembagian menurut hukum waris Islam sebagaimana dimaksudkan penggugat, dan pembagian harta warisan dibagi secara sama rata sesuai dengan hasil musyawarah keluarga.<sup>13</sup>



<sup>13</sup> Ibid.